

**PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DALAM  
MENYANGKAL PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BANJAR  
(Studi Pada Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan Partai  
Keadilan Sejahtera)**

**Engkus Kusnadi<sup>1\*</sup>,  
Teguh Anggoro<sup>2</sup>,  
Riza purnama<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia*

E-mail: nama.pengguna@mail.com (ditulis email korespondensi)

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai demokrasi perjuangan Indonesia dan partai keadilan sejahtera di Kota Banjar belum maksimal dilakukan, hal itu dikarenakan partai demokrasi perjuangan Indonesia dan partai keadilan sejahtera belum memiliki program kerja atau agenda politik yang memprioritaskan terkait pendidikan politik dalam menyangkal praktik politik uang. partai demokrasi perjuangan Indonesia dan partai keadilan sejahtera hanya melakukan kegiatan sosialisasi partai untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan jasa saja serta hanya dilakukan saat pemilu akan berlangsung.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknis *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan menggunakan sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai demokrasi perjuangan Indonesia dan partai keadilan sejahtera belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan partai demokrasi perjuangan Indonesia dan partai keadilan sejahtera belum memiliki program atau kegiatan politik yang memfokuskan kegiatan politik atau memberikan informasi-informasi terkait pendidikan politik khususnya terkait politik uang kepada masyarakat kecil hingga luas. partai demokrasi perjuangan Indonesia dan partai keadilan sejahtera melakukan aktivitas kegiatan pendekatan ke masyarakat secara masif dalam pemilu berlangsung, dan pasif saat pemilu.

**Kata kunci:** (Pendidikan politik, politik uang, politik, partai politik)

**ABSTRACT**

*Based on the results of observations, researchers found that the political education carried out by the Indonesian Democratic Party of Struggle and the Prosperous Justice Party in Banjar City has not been carried out optimally, this is because the Indonesian Democratic Struggle Party and the Prosperous Justice Party do not yet have work programs or political agendas that prioritize political education in deny the practice of*

*money politics. The Indonesian Democratic Party of Struggle and the Prosperous Justice Party only carry out party outreach activities to help people who need service assistance and only do this when elections are about to take place.*

*This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was collected through in-depth interviews from predetermined informants and carried out continuously until the data was saturated. In this research, the technique for determining informants used by researchers is the Purposive Sampling technique, namely the technique for determining informants using samples that are carried out deliberately and are in accordance with all the sample requirements that have been determined.*

*The results of the research show that the political education carried out by the Indonesian Democratic Party of Struggle and the Prosperous Justice Party has not run optimally, this is because the Indonesian Democratic Struggle Party and the Prosperous Justice Party do not yet have political programs or activities that focus on political activities or provide information related to education. politics, especially related to money politics, to small to large communities. The Indonesian Democratic Party of Struggle and the Prosperous Justice Party carried out massive outreach activities to the community during the elections, and were passive during the elections.*

**Keywords:** *(Political education, money politics, politics, political parties)*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik tentunya adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga Ia bisa ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan yang terjadi di lapangan.

Pendidikan politik merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol -

simbol, nilai - nilai, dan norma - norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan kemarin masih terjadi politik uang, meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar tidak mendapatkan adanya laporan resmi dari masyarakat terkait terjadinya politik uang namun yang terjadi di lapangan peneliti menemukan beberapa indikator yang mengarah ke politik uang seperti tim sukses peserta pemilu memberikan uang secara tunai, memberikan bantuan

berbentuk sembako dan fasilitas lingkungan kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik di tengah masyarakat sangat kurang dan perlu adanya sentuhan dari partai politik melalui kader - kader nya untuk dapat melakukan pendidikan politik dengan komunikasi politik dan sosialisasi politik. Adanya praktik politik uang dikalangan masyarakat tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut bahwa itu salah dan tidak di laporkan ke pihak yang berkaitan dalam hal ini adalah Bawaslu membuktikan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap pesta demokrasi yang jujur bersih dan adil itu sangat kurang.

## LANDASAN TEORI

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa wadah organisasi mereka menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa di konsolidasikan. Dengan demikian pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

### 1. Pendidikan Politik

Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan, sebaliknya pendidikan adalah institusi yang penting peranannya dalam hal pengembangan bidang politik. Coleman menyebutkan peranan sistem persekolahan dalam bidang politik, yaitu (1) sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional; (2) seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politik; (3)

integrasi dan pengembangan kesadaran politik nasional. Sosialisasi politik merupakan proses yang memebrikan kemungkinan bagi seorang untuk mengalami internalisasi norma dan suatu sistem politik. Sosialisasi politik sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan media masa, namn sekolah merupakan sekolah salah satu agen sosialisasi politik yang terpenting. Melalui sekolah seleksi dilakukan kepada calon elit politik melalui interaksi dan latihan berdemokrasi dan kepemimpinan.

Pendidikan demokrasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan lewat dua jalur, yakni lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam masyarakat. Pendidikan politik berperan sebagai *maintenance atau persistence*, untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond, dalam Cholisin, 2000:6.3).

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond, dan Verba, 1984:447). Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai – nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun non formal, dilakukan secara

terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab.

## 2. Politik Uang/Variasi Bentuk Patronase

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kami mendefinisikan patronase sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Di bawah ini beberapa istilah dalam variasi bentuk patronase adalah :

### 1) Pemberian Pribadi

Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye.

### 2) Pembelian Suara

Pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

### 3) Pelayanan dan Aktivitas

Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini,

para kandidat biasanya mempromosikan dirinya.

### 4) Barang-Barang Kelompok

Istilah *club goods* sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar *club goods* di Indonesia bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi – asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lain.

### 5) Pemberian Janji Politik/Proyek-Proyek

Kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Sebagaimana yang akan kita lihat, banyak kandidat menjanjikan akan memberikan ‘program-program’ dan ‘proyek-proyek’ yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan.

#### A. Nilai-Nilai Politik

##### 1. Efikasi Politik

Efikasi politik sebagai prediktor dan partisipasi politik secara daring, luring, serta memilih pada pemilu 2019 secara berurutan merupakan mediator dan efek.

##### 1. Alensi Politik

Aliansi politik, juga disebut sebagai koalisi politik, blok politik, adalah perjanjian kerja sama antara partai politik yang berbeda pada agenda politik umum, sering untuk tujuan bertarung dalam pemilihan umum untuk saling mendapatkan keuntungan dengan secara kolektif untuk ambang batas pemilu, atau manfaat dari karakteristik dari sistem pemungutan suara atau untuk pembentukan pemerintah setelah pemilihan umum. Sebuah pemerintahan koalisi terbentuk ketika aliansi politik datang ke kekuasaan, atau ketika hanya pluralitas (bukan mayoritas) belum tercapai dan beberapa pihak harus bekerja sama untuk memerintah.

#### 1. Sosialisasi Politik

Menurut (Syarbaini 2004:71) “sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat”.

#### 1. Sikap Terhadap Pemerintah

Salah satu dimensi yang menjadi fokus perhatian dalam proses-proses Pemerintahan adalah budaya kerja pemerintah, yang didalamnya mengandung terkait dengan tata nilai yang diyakini dan terwujud dalam pola tindak cerminan dari sikap dan aktivitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Budaya kerja pemerintah tersebut akan menentukan dan menunjukkan kualitas serta produktivitas kerja. Pada akhirnya disikapi masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif melalui respon secara kognitif, efektif dan evaluative.

#### B. Norma-Norma Politik

##### 1. Prinsip Kepemimpinan Demokratis

Salah satu norma yang mendasar dalam lembaga politik adalah prinsip kepemimpinan demokratis. Artinya, keputusan-keputusan penting harus diambil melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang benar harus menghormati suara rakyat dan menjalankan sistem pemerintahan dengan itikad baik.

##### 2. Keseimbangan Kekuasaan

Contoh norma ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang pemerintahan tersebut harus menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa campur tangan yang berlebihan dari cabang lainnya.

##### 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam tindakan-tindakan pemerintah adalah norma penting dalam lembaga politik. Masyarakat harus memiliki akses kepada informasi yang relevan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya.

#### C. Simbol-Simbol Partai

##### 1. Simbol atau Lambang Partai PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP identik dengan lambang kepala banteng berhidung putih atau moncong putih. Akar tanda partai ini ternyata berasal dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, cikal bakal PDIP, yang didirikan Sukarno pada 1927.

##### 2. Simbol atau Lambang Partai PKS

Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berganti rupa menjadi berbentuk bulat dengan dominan warna oranye-putih dan sedikit warna hitam. warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, dan optimisme. Kemudian warna oranye melambangkan kesucian, ketulusan, kebersihan, keikhlasan, dan kemuliaan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti menjelaskan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta memaparkan tentang variable yang diteliti, dalam hal ini adalah “Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Dalam Menyangkal Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kota Banjar (Studi Pada Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera)”.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, Sugiyono (2012:13) mengemukakan bahwa:

### **Desain Penelitian**

Pendekatan kualitatif merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau

sekolompok individu. Kasus-kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk lebih menjelaskan pemaparan berdasarkan fakta-fakta yang nyata dengan cara mengumpulkan data-data yang akurat berdasarkan wawancara dengan pihak yang terkait dengan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Dalam Menyangkal Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjar (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera).

Sehubungan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif, maka upaya yang digunakan pada pelaksanaannya menggunakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Surakhmad (2009:139) mengemukakan bahwa Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat penelitian berlangsung. Data tersebut mula-mula diinventarisir agar data-data tersebut dapat dijelaskan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang ada.

### **Informasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di partai demokrasi Indonesia perjuangan dan partai keadilan sejahtera di Kota

Banjar. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan menggunakan sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang telah ditentukan.

#### **Sumber Data**

Data Primer yaitu data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan informan kunci, penulis menggunakan teknik penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian sedangkan untuk menentukan informan lain di luar informan kunci penulis juga menggunakan teknik Asidental Sampling untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dipihak lain yang telah direkomendasikan oleh informan kunci sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Partai PDIP Kota Banjar
2. Ketua Partai PKS Kota Banjar
3. Masyarakat dari masing – masing kecamatan di Kota Banjar

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelahaan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, Koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

#### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan - keterangan dari pihak - pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Mengenai analisis data kualitatif, maka dilakukan secara kualitatif sesuai pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) mengemukakan bahwa model analisis data di lapangan dengan menggunakan “Model 1) Data Reduction (Reduksi Data); 2) Data Display (Penyajian Data); 3) Conclusion Drawing/Verifikation (Verifikasi Data)”.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah

usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun.

Pentingnya pendidikan politik dilakukan di internal partai PDI Perjuangan dan partai PKS Kota Banjar untuk memberikan pemahaman – pemahaman kepada para anggota partai politik mereka. Karena dengan pemahaman dan kecakapan anggota partai PDI Perjuangan dan partai PKS Kota Banjar dapat menjadi harmonisasi yang baik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat dalam menyangkal praktik politik uang.

Partai PDI Perjuangan dan partai PKS Kota Banjar dinilai kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari partai politik, hal itu disebabkan karena masih terjadinya transaksi politik uang saat pesta demokrasi mendatang. Hal tersebut dikarenakan partai PDI Perjuangan dan partai PKS Kota Banjar sangat massif dalam mengadakan kegiatan internal namun sangat pasif dalam kegiatan external yaitu kegiatan yang dilakukan ditengah – tengah masyarakat dengan tujuan memberikan pendidikan politik khususnya dalam menyangkal praktik politik uang. Tentu politik uang tidak akan terjadi di kalangan masyarakat ketika para partisipan politik para calon dan tim suksesnya tidak memulai hal tersebut.

### **1. Nilai – Nilai Politik**

#### **a. Partai P Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Setiap partai politik memiliki aturan di dalam internal partai masing-masing termasuk dengan partai demokrasi Indonesia perjuangan memiliki aturan di dalam internal partainya, yakni soal larangan keluarga inti kader berbeda partai. Aturan

larangan berbeda partai bagi kader berlaku bagi keluarga inti seperti istri atau suami dan anak. Sementara, anak yang terikat dalam aturan tersebut yakni anak yang masih dalam tanggungan. Sedangkan, anak di luar tanggungan orangtuanya, tak lagi masuk kategori keluarga inti. Kendati demikian, partai PDIP tetap memberikan catatan bagi orangtuanya sebagai kader. Karena kader yang anggota keluarga tidak termasuk inti bergabung dengan partai politik lain dianggap tak bisa memberikan pendidikan politik.

Selain itu, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan dengan mengikuti aturan atau ketentuan yang mengikat dengan pedoman partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat terkait politik uang dengan program perjuangan dan bidang ekonomi serta budaya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti partai PDI Perjuangan sudah sesuai dengan salah satu norma-norma politik yakni prinsip kepemimpinan demokratis yang dimana partai PDIP memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bertujuan untuk agar masyarakat memiliki peran dalam membangun pemerintahan serta menjalankan system pemerintahan dengan etiked baik.

#### **b. Partai Keadilan Sejahtera**

Adapun norma partai PKS menurut peneliti ialah partai keadilan sejahtera melaksanakan partainya dengan berlandaskan agama, karena partai PKS adalah partai Islam. Jadi setiap pendidikan politik atau pemberian pemahaman pendidikan politik, kajian politik terhadap para anggota atau kader dengan ditentukan nya sesuai Bayyan dan pasti akan mengikuti SOP ang sudah ditentukan dari pusat.

Sebagai partai politik yang telah berdiri sejak 1998, partai keadilan sejahtera sudah pasti memiliki tujuan dan fungsi sebagai partai politik. Seperti halnya partai keadilan sejahtera yang ingin mencitakan Indonesia menjadi negara yang kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban dan buminya menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai. Selain itu untuk mewujudkan visi dan misi partai PKS tentu saja butuh perjuangan panjang dan dukungan sumber daya manusia yang kuat, untuk itu lah partai PKS melakukan kaderisasi secara berkelanjutan. Sehingga dihasilkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat kemenangan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, partai PKS Kota Banjar sudah melakukan salah satu point dalam norma-norma politik yakni prinsip kepemimpinan demokratis dengan memberikan kesempatan dan pemahaman terkait pendidikan politik untuk ikut serta dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

## **2. Norma – Norma Politik**

### **a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Setiap partai politik memiliki aturan di dalam internal partai masing-masing termasuk dengan partai demokrasi Indonesia perjuangan memiliki aturan di dalam internal partainya, yakni soal larangan keluarga inti kader berbeda partai. Aturan larangan berbeda partai bagi kader berlaku bagi keluarga inti seperti istri atau suami dan anak. Sementara, anak yang terikat dalam aturan tersebut yakni anak yang masih dalam tanggungan.

Sedangkan, anak di luar tanggungan orangtuanya, tak lagi masuk kategori keluarga inti. Kendati demikian, partai PDIP tetap memberikan catatan bagi

orangtuanya sebagai kader. Karena kader yang anggota keluarga tidak termasuk inti bergabung dengan partai politik lain dianggap tak bisa memberikan pendidikan politik.

Selain itu, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan dengan mengikuti aturan atau ketentuan yang mengikat dengan pedoman partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat terkait politik uang dengan program perjuangan dan bidang ekonomi serta budaya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti partai PDI Perjuangan sudah sesuai dengan salah satu norma-norma politik yakni prinsip kepemimpinan demokratis yang dimana partai PDIP memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bertujuan untuk agar masyarakat memiliki peran dalam membangun pemerintahan serta menjalankan system pemerintahan dengan etika baik.

### **b. Partai Keadilan Sejahtera**

Adapun norma partai PKS menurut peneliti ialah partai keadilan sejahtera melaksanakan partainya dengan berlandaskan agama, karena partai PKS adalah partai Islam. Jadi setiap pendidikan politik atau pemberian pemahaman pendidikan politik, kajian politik terhadap para anggota atau kader dengan ditentukan nya sesuai Bayan dan pasti akan mengikuti SOP yang sudah ditentukan dari pusat.

Sebagai partai politik yang telah berdiri sejak 1998, partai keadilan sejahtera sudah pasti memiliki tujuan dan fungsi sebagai partai politik. Seperti halnya partai keadilan sejahtera yang ingin mencitakan Indonesia menjadi negara yang kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi

kontributor peradaban dan buminya menjadi taman kehidupan yang tenang dan damai. Selain itu untuk mewujudkan visi dan misi partai PKS tentu saja butuh perjuangan panjang dan dukungan sumber daya manusia yang kuat, untuk itu lah partai PKS melakukan kaderisasi secara berkelanjutan. Sehingga dihasilkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat kemenangan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, partai PKS Kota Banjar sudah melakukan salah satu point dalam norma-norma politik yakni prinsip kepemimpinan demokratis dengan memberikan kesempatan dan pemahaman terkait pendidikan politik untuk ikut serta dalam menjalankan sebuah pemerintahan.

### 3. Simbol – Simbol Politik

#### a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP identik dengan lambang kepala benteng berhidung putih atau moncong putih. Lambang tersebut menggambarkan nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.

Adapun makna atau arti dari simbol lambang partai PDI Perjuangan, ialah :

- 1) Warna dasar merah membara artinya berani mengambil resiko dalam memperjuangkan rakyat, keadilan, dan kebenaran
- 2) Tanduk kekar artinya berbasis kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan rakyat
- 3) Mata merah tajam artinya selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan

4) Moncong putih artinya dapat dipercaya dan komit untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran

5) Lingkaran tegas artinya terus menerus tanpa terputus memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Partai PDI Perjuangan dengan menerapkan kepada para kader untuk berani mengambil resiko dalam memperjuangkan rakyat, keadilan dan kebenaran dengan dibarengi kekuatan dan selalu memperjuangkan rakyat, sehingga dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam menjalankan pendidikan politik yang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mepercayai partai PDI Perjuangan untuk terus menerus memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa partai PDIP menggunakan simbol keberanian yang dimana simbol keberanian terdapat di salah satu simbol – simbol warna dasar merah membara. Untuk melakukan pendidikan politik yang dimana bertujuan agar masyarakat memiliki keberanian untuk tidak menerima politik uang.

#### b. Partai Keadilan Sejahtera

Partai keadilan sejahtera identik dengan partai islam dan fokus dalam menyiapkan kepemimpinan nasional yang kuat dengan basis kepemimpinan daerah. Kepemimpinan yang menjadi pelopor untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia serta mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Adapun makna atau arti dari simbol partai keadilan sejahtera, ialah :

- 1) Bentuk bulat melambangkan kesetaraan,

- keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila
- 2) Dua bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
  - 3) Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dan menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
  - 4) Warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia
  - 5) Warna orange melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimis, dan semangat muda
  - 6) Warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, beibawa, kepastian, aspiratif,

Pendidikan politik dengan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan demi memperjuangkan keadilan rakyat dengan berlandaskan Pancasila. Dengan diikuti keserasian untuk menjaga

keseimbangan dan kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara para kader PKS harus bersikap adil, ukhuwah, istiqomah, berani serta disiplin dalam memberikan contoh perilaku atau sikap dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan dibarengi sifat yang tulus dan mulia sehingga seluruh pengurus dan anggota partai PKS dimata rakyat memiliki ketegasan dan kepastian dalam menerima aspirasi masyarakat dengan semangat dan harapan baru.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa partai PKS sudah melakukan pendidikan politik dengan menganut dari simbol politik salah satunya ialah simbol warna putih yaitu para structural dapat memberikan pemahaman pendidikan politik secara menyeluruh dengan tulus dan ikhlas.

Partai PDI Perjuangan dan partai PKS Kota Banjar menyebutkan beberapa program atau kegiatan untuk membantu masyarakat atau mensejahterakan masyarakat dengan bantuan – bantuan yang disediakan. Kegiatan yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan dan partai PKS Kota Banjar dinilai tidak terlalu berbeda, tujuannya ialah untuk membantu masyarakat atau mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian berbeda dengan yang terjadi dilapangan, bahwa program atau kegiatan untuk melakukan sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat sangat minim. Hal tersebut bertentangan dengan pengakuan masing – masing ketua partai yang menyebutkan dirinya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dalam hal ini terkait menyangkal praktik politik uang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dari 4 (empat) kecamatan dapat diambil hasil

pembahasan bahwasanya partai politik PDIP dan partai PKS belum melakukan kegiatan pendidikan politik secara menyeluruh di setiap kecamatan, karena dari beberapa narasumber ada yang sama sekali tidak mengetahui dan ada yang mengetahui namun tidak pernah merasa ikut andil dalam melakukan pendidikan politik. Maka peneliti dengan ini berasumsi bahwa partai politik PDIP dan partai PKS belum melakukan program kerja yang dimana salah satu program yakni adanya sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat dalam menyangkal praktik politik uang, dan tidak menutup kemungkinan saat ini praktik politik masih sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara dari masyarakat, bahwa pengakuan yang di akui oleh partai PDI Perjuangan dan partai PKS bahwa telah melakukan sosialisasi politik atau pendidikan politik kepada masyarakat tidak terbukti atau tidak menyeluruh di rasakan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan dan partai keadilan sejahtera belum maksimal dilakukan. Peneliti menilai bahwa kondisi tersebut terjadi dikarenakan tugas dan fungsi setiap structural dan masing – masing bidang harus di tinjau kembali bagaimana setiap structural dan masing – masing bidang menjalankan tugasnya.

Pendidikan politik khususnya terkait dalam menyangkal praktik politik uang dapat terjadi ketika para kader atau anggota partai memahami betul apa itu tugas dan fungsi dari partai politik serta tugas dan fungsi sesuai di bidangnya masing-masing. Menurut peneliti tidak cukup hanya memahami saja tugas setiap anggota tetapi harus dilakukannya juga tindakan untuk mengimplementasikan

setiap kebijakan, kegiatan, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan mencerdaskan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Dalam Menyangkal Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Banjar ( Studi Pada Partai PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera ). Dalam meningkatkan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat:

Faktor terjadinya praktik politik uang yaitu disebabkan beberapa faktor, diantaranya partai politik kurang melakukan kegiatan sosialisasi atau memberikan pendidikan politik di tengah – tengah masyarakat atau di pemukiman penduduk sekitar, karena intensitas anggota tingkat RW yang kurang bersosialisasi, karena faktor ketidaktahuan, karena faktor ekonomi masyarakat yang menjadi alasan ketika masyarakat membutuhkan uang, dan karena faktor ikut – ikutan yang sudah menjadi tradisi atau rahasia umum. Ada indikasi bahwa masyarakat yang menerima politik uang dalam bentuk apapun dialami oleh tingkatan masyarakat yang miskin atau yang berkecukupan. Beberapa terjadinya politik uang yang beredar di masyarakat menurut responden dari masyarakat berupa sejumlah uang, sembako

Unsur yang terlibat dalam kegiatan praktek politik uang ini umumnya hampir sama terjadi dengan daerah-daerah lain. Beberapa tim sukses atau tim kemenangan yang dibentuk oleh partai politik atau perseorangan sangat tinggi perannya. Karena menurut

responden dari masyarakat, praktik politik uang terjadi atau yang menjadi pelakunya adalah tim sukses atau tim kemenangan dari calon legislatif itu sendiri. Pengambilan kebijakan atau tindakan dari badan hukum yang terkait dalam pemilu perlu dilakukan agar masyarakat sadar terkait praktik politik uang adalah tindakan pidana yang dapat merugikan, sehingga kesadaran masyarakat dalam menyangkal praktik politik uang dapat tumbuh dan menghapus sebuah tradisi yang sudah lama mengotori pesta demokrasi

## 5.2 Saran

1. Bagi partai politik, hendaknya melakukan kegiatan penyuluhan atau pendidikan politik dimulai dari lingkungan kecil yaitu RW hingga desa. Serta maksimalkan tugas fungsi yang berkaitan dengan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Bagi pemerintah, hendaknya melakukan sebuah kebijakan terkait pemilu dengan sebaik – baiknya. Melakukan sosialisasi dengan maksimal dan mengajak partai politik ikut terlibat langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendidikan politik seperti komunikasi dan sosialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang
3. Bagi badan hukum pemilu atau pengawas pemilu agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, larangan dan dampak dari melakukan praktik politik uang. Mengatur strategi agar tidak hanya

menunggu laporan dari masyarakat agar pesta demokrasi dapat terjadi dengan bersih tanpa adanya praktik politik uang

4. Bagi masyarakat, kesadaran dalam dirinya harus di tumbuhkan agar tidak melanjutkan tradisi atau kebiasaan yang mencoreng pemilu seperti menerima politik uang, menutup mata terhadap oknum yang melakukan politik uang, menganggap hal yang wajar saat terjadinya serangan fajar, dan dapat berubah untuk kedepannya agar tidak terjadinya penyesalan, dan tidak menjadi bagian dari partisipasi yang golput.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1981, *pemikiran dan perubahan politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Aspinall Edward. 2015. Mada Sukmajati. *Politik Uang Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Kosasih, Djahiri. 1995. *Dasar Umum Metodologi Pengajaran Pendidikan. Nilai Moral*. Bandung: Laboratorium Pengajaran PMP- IKIP Bandung.
- Azhari dan Kencana, Inu. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta, 2010

- Ismawan, Indra, Money Politics: *Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1), Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Kartono. Kartini, 1996, *Pemimpin dan Kepimpinan*. CV. Rajawali.
- Kantaprawira. Rusadi 1983. *Sistem Politik Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Kuntowijoyo. 1994. *Demokrasi & Budaya Demokrasi*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya
- M. Nur Khoiron, dkk. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*. LKIS. Yogyakarta
- Supriyadi, Dedi. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan A. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan. 2002. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. PT Syaamil Cipta Mesia. Bandung
- Artikel ilmiah:**
- Azkie Nurfaejrin, *Ini Tujuan dan Fungsi Partai Politik Menurut Undang-undang*. 26 Juli 2023. Tanggal di Akses 24 Oktober 2024
- <https://news.detik.com/berita/d-6842371/ini-tujuan-dan-fungsi-partai-politik-menurut-undang-undang>
- Anugrah Dwian Andari, *Pengertian dan Fungsi Pendidikan Politik*. 15 Desember 2023. Tanggal di Akses 22 Desember 2024
- [https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-partai-politik/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-partai-politik/#google_vignette)
- Mochamad Januar Rizki, *Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya*. 29 Agustus 2023. Tanggal di Akses 24 Oktober 2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-1t64ed535a9c126/>